

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, vol. 6 Juni 2015, PP 61-76
- Asni, Fauzi, Maryuni dan Sasonggo. 2013. The Management of the Village Fund Allocation asan Instrument towards Economic Independence Village (Case Student in Village in Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668*. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09.
- Alfiah, Ikmal Fitriyani. 2016. Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. *Thesis*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Aliyah, Siti dan Nahar Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8 Nomor 2: 97-189*.
- Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Public Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupatendan kota di jawa tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Darwis, 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang vol 3(1)*.
- Girsang. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, vol, 4, no.4, pp.166-176, Oct, 2015.

- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: ANDI
- Mahsun. 2014. Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting vol.1 No. 1 page 47-59*.
- Prasetyanto, Eko. 2012. Dampak alokasi dana desa pada era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian daerah di Indonesia. *Disertasi*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Puspitasari, Ni Luh Putu. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha vol. 3(1)*.
- Sumpeno, Wahjudin, 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. TheWorld Bank Aceh.
- Sukarni, Ni Wayan. 2016. Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana:545-572*.
- Utama, Made Suyana. 2008. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja serta Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal Fakultas Ekonomi Udayana*.
- Wahyudiono, Bambang. 2014. *Mudah Membaca Laporan Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). \
- Yulihantini, Dini Tri, 2018. Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember. *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 12, No. 1 Januari 2018 Hal. 37-50*

- ____.1999. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- ____.2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- ____.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ____.2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- ____.2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi berbasis Akrua
- ____.2014. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- ____.2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.